

INTISARI

Risiko fiskal merupakan kondisi ketidakpastian yang terjadi dimasa yang akan datang yang dapat mempengaruhi posisi dan pelaksanaan fiskal pemerintah yang dinyatakan dalam dokumen APBN dan APBD. Risiko fiskal atau anggaran akan mempengaruhi keakurasian Pemerintah dalam menentukan target-target anggaran atau menyebabkan realisasi anggaran pada masa yang akan datang tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi (menemukan) dan menganalisa faktor-faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data berasal dari penyebaran kuisioner dengan skala likert. Responden penelitian terdiri dari 108 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik dan analisis faktor konfirmatori.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah yaitu dalam variabel Penganggaran dan Mekanisme Penyusunan APBD yaitu Penyusunan RKA tidak selalu berpedoman pada KUA dan PAPS. Pemda belum menerapkan manajemen risiko di daerah secara maksimal dan nama program kegiatan dalam RKA-SKPD sesuai dengan yang tercantum dalam KUA dan PAPS. Informasi dan Komunikasi yaitu tujuan perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk kepentingan publik masih belum jelas dalam proses perencanaan keuangan dan SKPD tidak selalu dilibatkan dalam perumusan prioritas dan plafon anggaran untuk setiap program kegiatan yang dilakukan. Pada variabel Politik adanya arahan dari kepala daerah untuk memasukan program/kegiatan tertentu dalam RKA-SKPD. Adanya keinginan anggota DPRD untuk harus memasukan program/kegiatan tertentu di dalam RKA-SKPD yang disusun SKPD.

Variabel Perilaku Opportunistik dan Moral Hazard yaitu orientasi kepentingan kelompok tertentu masih dominan dalam penentuan sasaran rencana pembangunan dan keuangan, besaran atau jumlah anggaran untuk suatu kegiatan sering ditentukan oleh kepala SKPD dan peluang keterlibatan setiap pegawai dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dan kegiatan sangat kecil. Variabel Ekspetasi Politik ada kemungkinan kegiatan yang diusulkan tidak terealisasi seluruhnya karena keterlambatan pengesahan APBD, kekurangan atas anggaran yang diusulkan dalam RKA-SKPD sudah termasukantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan harga .

Kata Kunci: Risiko fiskal, penganggaran daerah, APBD, politik dalam penganggaran, analisis faktor konfirmatori.

ABSTRACT

Fiscal risks are uncertainties that occur in the future that could affect the implementation of the government's fiscal position and stated in documents national and regional budgets. Fiscal risks or the budget will affect the accuracy of the Government in determining targets led to the realization budget or budget in the future is not in accordance with the amount budgeted.

The purpose of this study was to identify (find) and to analyze factors in the fiscal risk budgeting. This research uses descriptive quantitative and qualitative methods. The data comes from questionnaires with Likert scale. Respondents consisted of 108 people Regional Civil Servants in West Southeast Maluku District who have been involved in the preparation of the budget. To achieve the objectives, the analysis tool used is descriptive statistical analysis and confirmatory factor analysis.

The results showed there are some risk factors are fiscal in local budgeting in variable mechanism Budgeting and Budgeting ie preparation of RKA is not always based on the KUA and PAPS. They are yet to apply risk management in the area to the fullest and the program name RKA-SKPD activities in accordance with those contained in the KUA and PAPS. Information and Communications is planning objectives and the budget allocation for the activities of public benefit remains unclear in the process of financial planning and SKPD not always involved in the formulation of priorities and budget ceilings for each program activities. In Politics variable directive from the head area to enter the program/ specific activities within RKA-SKPD. The desire of legislators to have to enter the program / specific activities within RKA SKPD-SKPD arranged.

Variable Opportunistic Behavior and Moral Hazard of onboarding interests of certain groups are still dominant in determining development plans and financial targets, the quantity of the budget for an activity is often determined by the head of SKPD and opportunities of each employee's involvement in the planning and budgeting and activity is very small. Political Expectations variable there is a possibility that the proposed activities are not fully recoverable due to delay ratification of the budget, the shortage on the proposed budget in the RKA-SKPD has included the anticipation of the possibility of price hike.

Keyword: *Fiscal risk, local government budgeting, APBD, political budgeting, Confirmatory Factor Analysis (CFA)*